

Nomor : 099/ED-WSB/XII/2020
Lamp :
Perihal : **Undangan**

Padang, 26 November 2020

**Kepada Yth.
Ibu Harne Julianti Tou
Tempat**

Salam Adil dan Lestari

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat merupakan lembaga jaringan independen pembela lingkungan yang berupaya mewujudkan tatanan lingkungan yang adil dan demokratis serta mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di Sumatera Barat.

Pembangunan tol trans Sumatera, ruas Pekanbaru (Riau)-Padang (Sumatera Barat) mulai berjalan. Pembangunan yang melewati kawasan hutan, pemukiman sampai kebun, lahan pertanian bahkan pemakaman warga. Masalah lahan muncul seperti di 5 Kenagarian (Nagari Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, Taeh Baruah, Gurun, Lubuk Batingkok), Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari Analisis WALHI Sumbang setidaknya ada ratusan hektar lahan dan ratusan rumah yang terdampak dari rencana pembangunan jalan tol ini, sampai sekarang masyarakat masih berupaya berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Melihat berbagai persoalan tersebut, maka penting diadakan diskusi untuk melihat dan menilai bagaimana sudut pandang para ahli (akademisi) dari berbagai disiplin ilmu tentang rencana proyek pembangunan jalan tol tersebut. Pandangan dari akademisi dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional agar rencana Pembangunan jalan tol tidak menimbulkan masalah pada masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia
Sumatera Barat

Jalan Beringin III A No. 9
Kelurahan Lolong Belanti
Kecamatan Padang Utara
Kota Padang

(0751) 7054673

Email:
walhisambar30@gmail.com
Website :
www.walhisambar.or.id
facebook.com/walhisambar
twitter.com/WalhiSumbar
instagram.com/walhisambar

Hari/ Tanggal : Senin, 30 November 2020
Waktu : 13.30 – Selesai
Tempat : Zoom Meeting
Room Meeting Online : Id: 868 6094 9088
Passcode : 344935



Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Eksekutif Daerah
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Sumatera Barat



USLAINI
Direktur Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia
Sumatera Barat

Jalan Beringin III A No. 9
Kelurahan Lolong Belanti
Kecamatan Padang Utara
Kota Padang

(0751) 7054673

Email:
walhisumbar30@gmail.com
Website :
www.walhisumbar.or.id
facebook.com/walhisumbar
twitter.com/WalhiSumbar
instagram.com/walhisumbar

PEMBANGUNAN TOL TRANS SUMATERA

(SUDUT PANDANG PWK)

HARNE JULIANTI TOU



**PANDANGAN DAN TINJAUAN AKADEMISI
DARI BERBAGAI DISIPLIN ILMU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI
SEKSI KAB. LIMA PULUH KOTA**

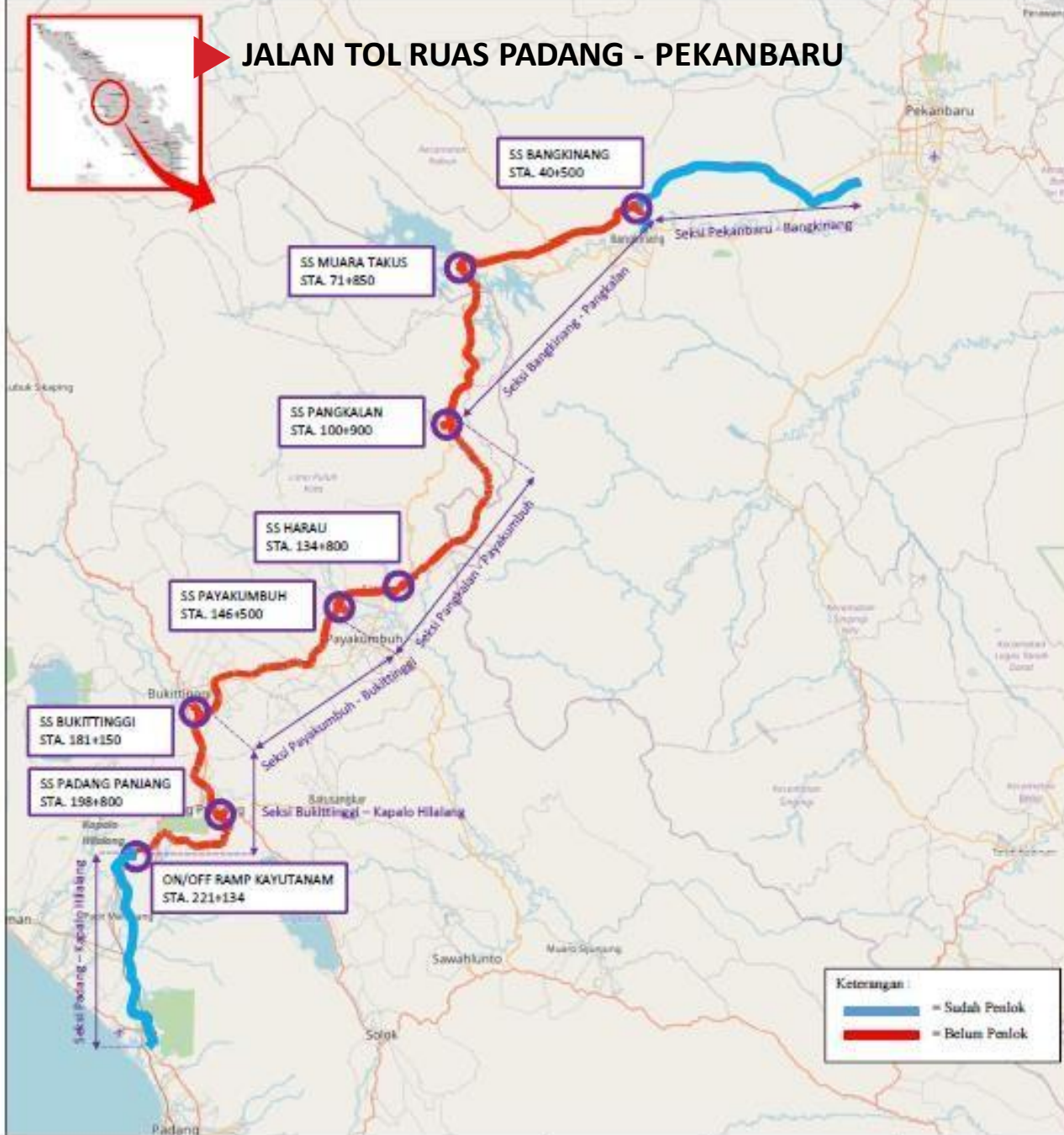
JALAN TOL ?

JALAN TOL \neq JALAN BEBAS HAMBATAN

PP NO. 26 TAHUN 2008 J.O PP NO. 13 TAHUN 2017 TENTANG RTRWN PASAL 18 AYAT 5 DAN 6

- JALAN TOL DIKEMBANGKAN UNTUK MEMPERCEPAT PERWUJUDAN JARINGAN JALAN BEBAS HAMBATAN SEBAGAI BAGIAN DARI JARINGAN JALAN NASIONAL (AYAT 5).
- JARINGAN JALAN BEBAS HAMBATAN TERCANTUM DALAM LAMPIRAN III YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN PEMERINTAH INI (AYAT 6).

JALAN TOL RUAS PADANG - PEKANBARU

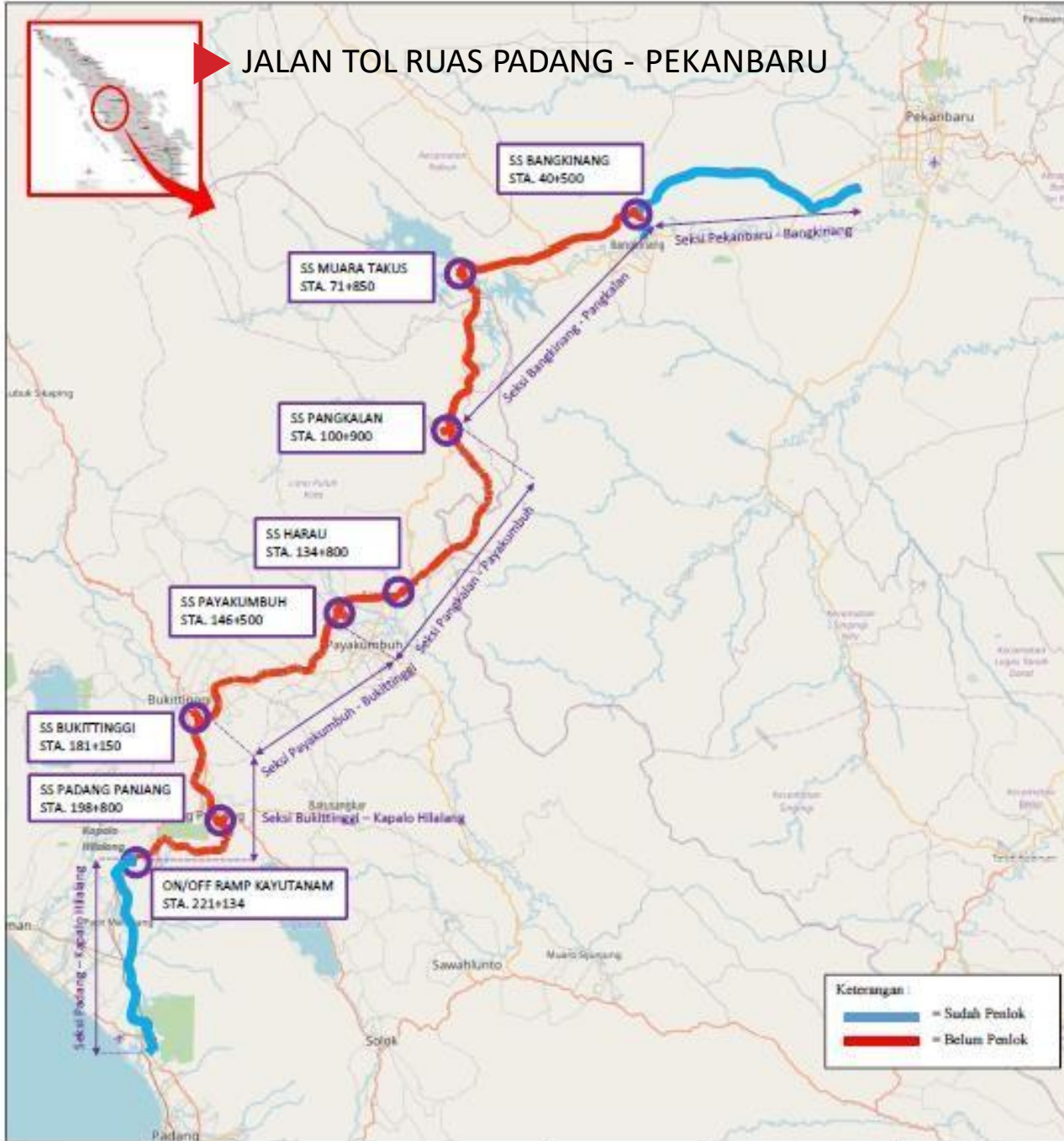


PENUGASAN PEMERINTAH

berdasarkan
Perpres 100 th.
2014 j.o. Perpres
117 th. 2015

Seksi	Panjang (km)
Pekanbaru – Bangkinang	40
Bangkinang – Pangkalan	60,6
Pangkalan – Payakumbuh	45
Payakumbuh – Bukittinggi	32
Bukittinggi – Sicincin	39,9
Sicincin – Padang	36,6
TOTAL	256

JALAN TOL RUAS PADANG - PEKANBARU



- Secara Umum Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Padang melalui kondisi topografi yang cukup beragam
- Jalan Tol juga melewati berbagai kawasan tata guna lahan seperti lahan kosong, perkebunan, persawahan, permukiman bahkan kawasan kehutanan.
- Utama Karya selalu berupaya meminimalisir dampak negatif pembangunan JTTs terhadap lingkungan dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kriteria teknis dan Standar Pelayanan Minimum serta biaya investasi.
- HK selalu berkomitmen dalam Pemenuhan Dokumen AMDAL dan Ijin Lingkungan berdasarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019** tentang **Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012** tentang **Izin Lingkungan**
- HK juga selalu berkomitmen memenuhi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018** tentang **Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan** untuk setiap jalan tol yang melewati kawasan hutan
- Jalan Tol yang melalui Kawasan Hutan Primer dan Lahan Gambut juga akan mengurus perizinan Revisi PIPPIB sesuai **Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019** tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)**

REVISI RTRW KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- **RENCANA JALAN TOL YANG MELINTASI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ADALAH MASIH MERUPAKAN ARAHAN PENGEMBANGAN JALAN TOL YANG AKAN DIKEMBANGKAN MELIPUTI RUAS PEKANBARU – BANGKINANG – PAYAKUMBUH – TANAH DATARSESUAI LAMPIRAN II PP 13/2012 TENTANG RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- **ADAPUN RENCANA PENGEMBANGAN JALAN TOL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI JALAN TOL MENUJU LUAR JALAN TOL, AKAN MEMPENGARUHI BEBERAPA NAGARI / KECAMATAN SEBAGAI BERIKUT:**
 - **KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**
 - **KECAMATAN HARAU**
 - **KECAMATAN LUAK**
 - **KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**
- ❖ **(NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG, KOTO TANGAH SIMALANGGANG, TAEH BARUAH, GURUN, LUBUK BATINGKOK), KECAMATAN PAYAKUMBUH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**



POKOK-POKOK PIKIRAN :

- 1. PROSES PERENCANAAN** (PERSIAPAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN)
- 2. HIRARKI PERENCANAAN** (TOP DOWN ATAU BOTTOM UP)
- 3. PENDEKATAN PERENCANAAN** (PARTIAL ATAU KOMPREHENSIF)
- 4. PELAKU DAN PERAN** (PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA)
- 5. KONSEKWENSI** (NEGATIF DAN POSITIF)

PERSOALAN YANG MUNCUL DARI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SEKSI KAB. LIMA PULUH KOTA :

- **ALIH FUNGSI LAHAN**
- **TERPAKAINYA LAHAN WARGA**
- **HILANGNYA MATA PENCAHARIAN WARGA**
- **DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

SARAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG TERJADI :

- **KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH, SWASTA (HK) DAN MASYARAKAT**
- **KOORDINASI YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**
- **MASYARAKAT MENERIMA GANTI UNTUNG DARI LAHAN YANG TERPAKAI**
- **MEMBUKA PELUANG USAHA BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK (PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH)**

PERTANYAAN AKHIRNYA :

- 1. BEGITU PENTINGKAH PEMBANGUNAN JALAN TOL?**
- 2. JALAN TOL MILIK SIAPA DAN UNTUK SIAPA? (FUNGSI DAN MANFAAT)**
- 3. MUNGKINKAH LEWAT JALAN BAWAH TANAH ?**

TERIMA KASIH

